

# SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE

(Mozaik Sejarah Lokal)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE**

**(Mozaik Sejarah Lokal)**

Najamuddin | Patahuddin | Bahri |  
Ahmadin | M. Rasyid Ridha | Burhanuddin Pabitjara |  
St. Junaeda | M. Saleh Madjid | Amiruddin |  
Mustari Bosra | Abd. Rahman |  
Darman Manda | Mubarak Dahlan | Jumadi |  
Andi Ima Kesuma

**RAYHAN INTERMEDIA  
2016**

# **Sulawesi Selatan Tempo Doeloe: Mozaik Sejarah Lokal**

Copyright © Najamuddin, dkk

**Penerbit:**

**RAYHAN INTERMEDIA**

Jl. Naja Dg. Nai Lr. 4 No. 8  
Rappokalling Makassar 90216  
Tlp. (0411) 433602, SMS: 082187619656  
Email: rayhanbook@gmail.com  
Toko Buku Online Rayhan Intermedia Group:  
[www.tokobukurayhan.com](http://www.tokobukurayhan.com)

Desain Cover: Saung Visual

*Cetakan Pertama*, Agustus 2009

*Cetakan Kedua*, Agustus 2015

Perpustakaan Nasional:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Najamuddin, dkk, Sulawesi Selatan Tempo Doeloe,  
Cet. III: Oktober 2016, Rayhan Intermedia,  
326 hlm (xiv + 312 hlm): 14 x 21 cm  
ISBN: 978-602-95545-6-4

# DAFTAR ISI

## **PENGANTAR PENERBIT — v**

## **BAGIAN PERTAMA KEKUASAAN, DINAMIKA POLITIK, DAN PERJUANGAN — 1**

Kontrak Sosial: Pola Hubungan Bangsawan  
dan Rakyat di Sulawesi Selatan — 2

▪ **Najamuddin**

Perjuangan dan Pengorbanan Rakyat Sulawesi  
Selatan: Reinterpretasi Nilai Sejarah dari  
Peristiwa Korban 40.000 Jiwa — 17

▪ **Patahuddin**

Perebutan Tahta di Sulawesi Selatan — 32

▪ **Bahri**

Kuasa Belanda di Nusa Selayar — 61

▪ **Ahmadin**

Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang  
di Pare-Pare 1942-1945 — 81

▪ **M. Rasyid Ridha**

Suppa Pada Masa Revolusi Fisik — 100

▪ **Burhanuddin Pabitjara**

Menggagas Ide Kebangsaan: Dinamika Organisasi Nasional di Sulawesi Selatan dalam Mengawal Pergerakan Nasional — 142

▪ **St. Junaeda**

## **BAGIAN KEDUA**

### **HUBUNGAN DIPLOMATIK & SISTEM**

**PEMERINTAHAN — 165**

Meretas Hubungan Bima-Makassar Abad XVII — 167

▪ **M. Saleh Madjid**

Hubungan Diplomatik Bone-Buton Abad XVII — 190

▪ **Amiruddin**

Sejarah Singkat Bate Salapanga Ri Gowa — 218

▪ **Mustari Bosra**

Patuntung: Sistem Pemerintahan di Butta Toa Kajang — 228

▪ **Abd. Rahman A. Sakka**

## **BAGIAN KETIGA**

**WARISAN BUDAYA & PROFIL TOKOH — 244**

Upacara Perkawinan Komunitas Toani Tolotang di Amparita — 245

▪ **Darman Manda**

Phinisi: Identitas Bugis-Makassar — 256

▪ **Mubarak Dahlan**

Akar Kepahlawanan Andi Sultan Daeng Raja  
Karaeng Gantarang — 279

▪ **Jumadi**

Lataddampare Puang Rimaggalatung: Sosok  
Pemikir dan Pemimpin Lokal Wajo — 290

▪ **Andi Ima Kesuma**

**BIOGRAFI PENULIS — 306**

## PENGANTAR PENERBIT

Upaya menemukenali identitas lokal masing-masing etnik dan spasial di Indonesia, tampaknya semakin gencar dilakukan terutama pasca bergulirnya otonomi daerah. Bahkan tidak jarang keserupaan (hubungan) sejarah dan kemiripan warisan budaya menjadi determinan kuat atas terbentuknya wilayah administrasi baru (pemekaran wilayah). Tak terkecuali beberapa daerah di Sulawesi Selatan, sejauh ini masyarakatnya pun tampak gencar melakukan gerakan kebudayaan berdimensi historis. Bersama kerinduan akan masa lalu atas nama identitas inilah, kehadiran buku ini menjadi penting.

Di sisi lain harus diakui bahwa mempelajari sejarah lokal tentu tidak cukup hanya dengan pemahaman secara konseptual dan metodologis, tetapi memerlukan telaah khusus atas sejumlah peristiwa. Untuk maksud tersebut, diperlukan pengayaan bangunan ilmiah tersebut dengan cara menyajikan beberapa peristiwa lokal di Sulawesi



Selatan. Banyak peristiwa menarik dalam tumpukan lapis waktu yang memerlukan sentuhan kemauan untuk menjamahnya serta menghadirkannya dalam rupa buku bacaan dan bahan ajar.

Lalu seperti apa hubungan penguasa dan rakyat (kontrak sosial)?, mengapa terjadi perebutan tahta?, bagaimana kaum kolonial menjajah?, kapan terjadi hubungan kekuasaan dengan dunia luar?, siapa saja tokoh pengukir sejarah?, dan apa saja warisan budaya masa lampau di Sulawesi Selatan?, itulah sederet pertanyaan yang dijawab oleh sejumlah penulis yang tersaji dalam setiap bagian buku ini.

Bagian awal buku ini memuat konsep *Tomanurung* yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, maupun dalam kedudukan politis di Sulawesi Selatan. Kontrak sosial dan kontrak pemerintahan inilah yang kemudian mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing kedua belah pihak antara elit bangsawan dan rakyat kebanyakan sebagai manusia Bugis-Makassar. Kedua kontrak atau ikatan perjanjian tersebut mencerminkan adanya pola hubungan yang seimbang antara elit bangsawan atau penguasa dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan.

Bagian berikut buku ini mengurai tentang suatu asumsi bahwa pada hakekatnya penarikan nilai dari suatu episode sejarah tidak lain dari proses subyektifikasi, yaitu pemberian interpretasi terhadap suatu episode sejarah dalam kaitannya dengan kebutuhan masa kini. Demikian pula halnya dalam penarikan nilai sejarah dari episode sejarah terror Westerling di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini adalah salah satu bahagian dari episode sejarah perjuangan bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan yang dikenal dengan istilah Perang Kemerdekaan. Periode Perang Kemerdekaan dalam Sejarah Indonesia memiliki ciri-ciri khas, yaitu sarat dengan emosi, semangat, keberanian, kerelaan berkorban, cinta tanah air, bangsa dan Negara sendiri. Semangat dan jiwa kepahlawanan tersebut tetap diperlukan sepanjang zaman dan seluas ruang yang ada dalam dunia ini.

Peristiwa lokal lainnya yang tidak kalah menarik, yakni kondisi Sulawesi Selatan sejak abad XVI yang ditandai oleh konflik berupa peperangan antara kerajaan untuk memperebutkan hegemoni (kekuasaan tunggal). Karena itu, Tellu Poccoe (Bone, Wajo, Soppeng) lahir seabgai suatu persekutuan berupa ikatan persaudaraan yang bertujuan politik, yakni melawan serta mengimbangi kekuatan

Kerajaan Gowa. Persekutuan ini dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang diadakan di Timurung Kampung Bunne Desa Allamungpatue, Kecamatan Ajang Ale, (Kabupaten Bone sekarang) pada 1582.

Khusus kurun kolonial di Sulawesi Selatan, dibahas dalam dua judul masing-masing mengurai tentang Selayar masa pendudukan Belanda-Jepang dan nasib perempuan di antara kebijakan militer Jepang di Pare-pare. Bahkan dilanjutkan dengan uraian tentang Suppa masa revolusi fisik. Menurut penulisnya, perjuangan rakyat Suppa dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang Imperialisme Belanda. Selain itu, suatu fakta historis menunjukkan bahwa perjuangan itu, merupakan konsekuensi logis daripada proklamasi 17 Agustus 1945.

Dunia politik yang dipaparkan dalam buku ini, tidak hanya sebatas hubungan antar penguasa dan rakyat serta perebutan tahta, akan tetapi hubungan Sulawesi Selatan dengan dunia luar pun dibahas. Sebut saja hubungan Makassar dengan Bima, serta hubungan diplomatik Bone dengan Buton menjadi warna tersendiri bagi kajian sejarah lokal di daerah ini.

Satu kajian menarik lagi yakni ulasan tentang spasial yang terletak antara Sungai Je'neberang dan Sungai Tallo (sekarang, bagian dari wilayah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar). Terdapat 9 (sembilan) buah kampung yang didiami oleh penduduk yang dikenal sebagai *Tu Gowa* atau *Tu Mangkasara*, yaitu Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang (Parangtambung?), Data, Agang Je'ne (Pacci'nongang?), Bisei, Sero', dan Kalling (Kassi?). Kampung-kampung tersebut merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan diperintah/dipimpin oleh seorang raja yang disebut juga sebagai *Kasuwiyang/Gallarrang* Dengan panggilan/gelar kehormatan sebagai *Daengta/Kare (Karaeng)*. Dalam perkembangan selanjutnya, kesembilan kerajaan kecil tersebut bersepakat menggabungkan diri sehingga menjadi "semacam kerajaan federasi."

Melengkapi uraian tentang kekuasaan dan dunia politik di Sulawesi Selatan, buku ini juga mengurai tentang warisan budaya masing-masing kepercayaan Patuntung di komunitas Amma Toa Kajang, tradisi perkawinan di Komunitas Tolotang Amparita, dan phinisi sebagai simbol identitas Bugis-Makassar. Kemudian dua tulisan terakhir masing-masing mengurai tentang Akar Kepahlawanan Andi

Sultan Daeng Raja serta Lataddampare Puang Rimaggalatung sebagai sosok pemikir dan pemimpin Lokal Wajo.

Buku ini ibarat sebuah jendela masa yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk melihat dimensi kelampuan Sulawesi Selatan. Semoga buku karya dosen-dosen jurusan sejarah UNM ini dapat membantu kita dalam upaya menemukan identitas lokal dan jati diri serta menjadi materi kuliah sejarah lokal.

**Makassar, 10 Februari 2015**

**REDAKSI RAYHAN INTERMEDIA**



# KUASA BELANDA DI NUSA SELAYAR

Ahmadin

Selayar yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pasca perjanjian Bongaya pun harus kembali harus menerima kenyataan bahwa ia akan diperintah oleh satu kekuatan politik baru yakni Belanda dengan sejumlah kebijakan politik-ekonomi yang "mengerikan". Mengawali kekuasaannya di Selayar, kaum penjajah asal daratan Eropa ini membentuk pemerintahan tingkat keresidenan bernama *Residentie Salaier*. Keresidenan ini kedudukannya di bawah kekuasaan langsung kompeni Belanda, yakni Residen W. Coutrier (1737-1743). Berdasarkan catatan yang tercantum dalam daftar nama-nama kepala daerah/pemerintah di daerah Selayar, menunjukkan bahwa rentang waktu antara 1739 hingga 1820, pemerintah Selayar dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Setelah itu, antara 1839-1857 pimpinan pemerintahan adalah Gezaghebber (Pettor) dan sesudah 1857 barulah pemerintahan dipegang oleh seorang Controleur hingga masa pendudukan Jepang (Anonim, 1979: 2).

Dalam menjalankan kekuasaan, Keresidenan Selayar membawahi sebanyak 13 kerajaan masing-masing Kerajaan Tanete, Batangmata, Onto, Buki, Mare-mare, Gantarang, Bonea, Putabangung, Bontobangung, Ballabulo, Laiyolo, Bantobarusu, dan Barang-barang. Bahkan ditambah dengan *Vors Hoofde* pulau-pulau yang terdiri atas Gallarang Tambolongan, Gallarang Kajuadi, Gallarang Kalahu Toa, Punggaha Rajuni, Punggaha Jampea, dan Karaeng Bonerate (Arief, ed., 2004: 39-40).

Pembentukan struktur pemerintahan masa kolonial Belanda ini, menunjukkan bahwa Selayar memang merupakan wilayah yang sangat penting kedudukannya. Karena itu, selama kurun waktu 1739-1820 Selayar diberi status keresidenan dengan pangkat pejabatnya yakni Residen. Penempatan Residen diduga terkait dengan posisi Selayar yang berada di jalur lalu lintas pelayaran niaga dan militer antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Maluku, serta antara Jawa dengan Maluku. Pulau Selayar berfungsi sebagai tempat transit bagi perahu yang terhalang ombak, tempat pengintai keamanan pelayaran yang lewat di sekitar laut Selayar dan tempat menetap bagi petani kelapa dan nelayan (Abduh, dkk, 1981/1982: 84; Anonim, 1984). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa selain karena faktor



politik, indikator potensi Sumber Daya Alam (SDA) atau potensi ekonomi yang prospektif menyebabkan wilayah ini di kelak kemudian hari tampil sebagai daerah tingkat II.

Perkembangan selanjutnya, pembentukan wilayah administrasi pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan dan Tenggara pun dilakukan. Hal ini terjadi pasca pembaharuan "Perjanjian Bongaya" atau kemudian dikenal sebagai "Kontrak Bongaya" yang ditandatangani bersama antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan raja-raja di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Tenggara 9 Agustus 1824. Akhirnya, negeri-negeri di Sulawesi Selatan pun terbagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut: (1) *Rectsreek Bestuurd Gebeid* atau *Goevernementslanden*, yakni negeri-negeri yang langsung berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda; (2) *Zelfbestuur landshappen* atau *Varstelenden*, yakni negeri-negeri kerajaan yang tidak berada langsung di bawah pemerintahan Belanda; dan (3) Kerajaan-kerajaan merdeka yang hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda didasarkan pada Perjanjian Bongaya yang diperbaharui Tahun 1824 (Anonim, 1979: 40).

Wilayah administratif pemerintah Hindia Belanda yang telah terbentuk di Sulawesi Selatan

tersebut, tidak serta merta memperlulus rencana atau program kolonialisasi mereka. Sebaliknya, kendala fundamental yang dihadapi yakni keterbatasan tenaga yang ahli di bidang pemerintahan. Akibatnya, alternatif strategi yang tempuh oleh pemerintah kolonial Belanda yakni menduduki secara langsung dan menguasai wilayah-wilayah yang berada di sekitar Makassar. Dengan demikian, penguasaan atas wilayah-wilayah (negeri) tersebut akan memudahkan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Penguasaan atas wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, pada gilirannya melahirkan pembagian wilayah seperti: *Gewest*, *Afdeling*, *Onderafdeling*, dan *Distrik*. Tiga wilayah pertama, masing-masing dipengang oleh seorang *Pamongpraja* Belanda, sedangkan 1 (satu) wilayah lainnya dipegang oleh *Pamongpraja Pribumi*. *Gewest* atau provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, *Afdeling* dipegang oleh seorang yang berpangkat *Asistent Resident*, *Onderafdeling* dipegang oleh seorang *Kontroleur* (Ahmadin, 2001) dan pada tingkat distrik dipengang oleh seorang *regent* (Arief, ed., 2004).

Dalam rangka menata pemerintahan di daerah-daerah, pada 1824 pemerintahan Hindia Belanda mengumumkan pengaturan tersebut dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) 1824 No. 31a. Pemerintahan Makassar dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Makassar en Onderhoorigheden*) dibagi dalam 5 (lima) wilayah administrasi pemerintahan yaitu: (1) Makassar, meliputi kota pelabuhan Makassar, Fort Rotterdam, kota Vardingen, dan kampung-kampung di sekitarnya serta pulau-pulau yang terletak di depan kota pelabuhan Makassar; (2) Distrik-distrik di bagian Selatan (*Zuider Districten*), meliputi distrik-distrik: Aing Towa, Bontolebang, Galesong, Polombangkeng, Sowakang, Mamuju, Balo, Lengkesa, Takalar, Topejawa, Lakatong; (3) Distrik-distrik di bagian Utara (*Noorder Districten*), meliputi distrik-distrik: Maros, Bontoa, Tangkutu, Tanralili, Sumbang, Rilaut, Tomboro, Riraya, Sodiang, Malawa, Camba, Baloci, Laiya, Labuaya, Bungoro, Pangkajene, Bungo, Labakkang, Marang, Kalukua, Segeri dan Katena; (4) Bulukumba dan Bonthain, meliputi distrik-distrik: Bonthain dan Tompobulu, Gantarang, Tala, Palewooi, Tanah Beru, Bontotanga, Lemo-lemo, Ujung Loe, Weiro, Langa-langa, Tiro, dan Bira; (5) Selayar meliputi distrik-distrik: Bontobangung, Tanete, Batangmata, Buki, Mare-mare, Bonea, Opa-opa,

Gantarang, Bulu-bulu, Laiyolo, Bonto Baros, barang-barang, Bangon, dan Onto (Poelinggomang, 2004: 40; Lihat juga Sibenius, 1807: 208).

Selain uraian mengenai pembentukan struktur pemerintahan di Selayar dalam kurun kolonial, maka gejolak politik dalam wujud perlawanan rakyat terhadap kebijakan kaum penjajah ini pun tidak kalah penting untuk diungkap. Berdasarkan beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa VOC, tampak tidak terjadi gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di daerah ini. Barulah gerakan perlawanan muncul, pada abad ke-19 yang ditandai oleh terjadinya berbagai huru-hara. Sekadar digambarkan bahwa saat ini, pemerintahan di Selayar terdiri atas 14 regentschappen, yakni Bontobangung, Tanete, Batangmata, Buki, Maremare, Bonea, Opa-opa, Gantarang, Balla-bulu, Laiyolo, Bonto Barus, Barangbarang, Putabangung, dan Onto (Anonim, 1973: 272).

Perlawanan rakyat Selayar bermula sejak terjadinya huru-hara yang berlangsung 1845-1846 di Regentschap Bontobangun. Motif peristiwa ini adalah terjadinya perselisihan antar Bongo Daeng Sagina dan wakilnya Daeng Ujung. Akhir huru-hara terjadi ditandai oleh penyingkiran kedua pejabat tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada

tahun 1846 terjadi pemberontakan di Tanete melawan Belanda yang dinahkodai oleh Daeng Manojengang anak dari Daeng Kebo (Kepala Daerah Tanete). Pemberontakan ini dimulai sejak kaburnya seorang narapidana bernama Gege dari penjajah Belanda yang kemudian mendapat suaka dari Daeng Manojengang. Ketika pasukan Belanda dikirim ke Tanete untuk menerima kembali penyerahan Gege, maka ditolak oleh Daeng Kebo dan bahkan mereka melakukan perlawanan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya mereka tidak mampu bertahan terhadap serangan Belanda. Karena itu, mereka melarikan diri ke Bone untuk meminta perlindungan di kerajaan ini. Pada tahun 1847, ketiga pemberontak terpaksa kembali ke Tanete dan menyerah (Abduh, dkk, 1981/1982: 85).

Konsekuensi atas penyerahan diri tersebut, yakni hukuman kemudian dijatuhkan pada Manojengang dan Gege, sebagaimana termaktub dalam vonisnya sebagai berikut:

Nani Pattantumo Daeng Manojengang, annyalai ri naewana Goboronemen, nanihukkommo nitunrung dongkonna, nani rante, nanampa ripela 20 taunna, kere-kere mae sallang pakrasangang nakellai Tumalompoo ri Selebese. Nihukkung tongi pole riongkosokna Jusutisi, nani tappuki anne bicarayya ri 17 Simtembere ri taung 1847 riparasidengang Tuan Dipala Siangang tumabbicarayya Abdullah

Husain, Laparida Daeng Silasa, Daeng Sitaba, Koe Paccio, Amasaribu, Uwak Jama, Uwak Bena, Jahadina, Saleh, Tatanakia. Iangasenna anne tumabbicara siangang Tuan sekretarisi Lantara Tuan Pakere Pele ampadongkokai bate limanna (Koleksi Arsip Selayar, 1826-1848).

Dalam sumber tersebut dijelaskan terjemahannya bahwa Daeng Manojengang dijatuhi hukuman oleh pengadilan Hindia Belanda 17 September 1847 karena dipersalahkan melawan pemerintah Hindia Belanda, dengan hukuman dera, dirantai dan dibuang selama 20 tahun ke daerah yang ditentukan oleh gubernur di Sulawesi. Persidangan dipimpin oleh Tuan Dipala bersama anggotanya (tumabbicara). Abdullah Husain Laparida Daeng Silasa, Daeng Sitaba, Koe Paccio, Masaribu, Uwa Jama, Uwak Bena, Jahadina, Saleh, Tatak Nakia. Kesemuanya anggota sidang (tumabbicara) bersama tuan sekretaris Lantara Tuan Pakere membubuhkan tanda tangannya. (Lihat Anonim. "Vonis Daeng Mannoengen" dalam edisi bahasa Indonesia dan Makassar (Makassar: Koleksi Arsip Selayar, 1826-1848).

Masih terkait dengan prosesi hukuman yang dijatuhkan atas Daeng Manojengang, dapat dibaca sebagai berikut:

Nalanggeremi surat bosoloikna Tumalompoa Jenderal di Jakattara di 14 bulan taung 1848 Nomor 12, naringangi hukkunna I Muhammad Daeng Manojengang lanri nirantena, nani pajama 20 taungna, ia tenamo nani rante. Siagang tommy di parentana Gobornamen di 30 bulan September di taung 1847, Nomor 44 najokjoki Banyumasa Nusa Kambangan napajamai.

Pernyataan tersebut, bermakna “kemudian dengan surat keputusan Gubernur Jenderal di Jakarta No. 12 Tanggal 14 Februari 1848, hukuman Daeng Manojengang dikurangi atau diringankan menjadi 20 tahun kerja rodi dengan tidak dirantai lagi. Alasan putusan keringanan hukuman ini, sebab si terhukum bersedia menerima hukumannya dirantai, dipekerjakan rodi 20 tahun, dibuang ke Banyumas, Nusa Kambangan sesuai Surat Perintah Gubernemen Tanggal 30 September 1847 No. 44.

Sementara itu, hukuman Gege meskipun dalam lembaran vonisnya berlainan namun putusannya sama dengan Daeng Manojengang, yakni hukuman dera, dirantai dan dibuang dalam waktu yang sama ke Banyumas Nusa Kambangan. Demikian pula dengan keinginan dari Gubernur Jenderal di Jakarta berdasarkan satu keputusan yang sama, yaitu hukuman Gege diringankan dan diperlakukan sama dengan hukuman Daeng Manojengang. Menurut Muhammad Abduh bahwa melihat beratnya

hukuman yang dibebankan kepada Daeng Manojengang dan Gege, maka diduga perlawanan yang mereka lakukan itu menimbulkan korban jiwa di pihak Belanda (Abduh, 1981/1982: 84-85).

Dalam perkembangan selanjutnya, tanggal 31 Desember 1906, Gubernur Jenderal H.N.A. Swart (1906-1908) mengeluarkan Surat Keputusan No. 6041/2 Tahun 1906 tentang pembagian wilayah. Sekadar digambarkan bahwa pada tahun 1906, Sulawesi Selatan secara keseluruhan telah berada langsung di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan pernyataan pendek (Abduh, 1981/1982: 49). Karena itu, Sulawesi terbagi atas Afdeling Pare-pare, Makassar, Bonthain, Bone, Mandar, Luwu, Buton, Laiwui (di pesisir Sulawesi Tenggara). Selanjutnya, Afdeling Bonthain dibagi menjadi beberapa Onderafdeling yakni Onderafdeling Selayar, Bulukumba, Sinjai, dan Bonthain sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pada setiap Onderafdeling dibantu oleh Kontrolir (*Controleur*) bersama aparatnya yang disebut opu atau karaeng (Anonim, 1991).

Pada tahun 1909 Onderafdeling Selayar dibagi atas beberapa *Regenschap*, *Gallarang*, *Punggawa*, dan *Kampung*. Hal ini selanjutnya dapat dilihat pada Surat Keputusan Contoleur Selayar 13 Desember



1909, yang membagi atas: *Regenschappen* Bontobangung, *Regenschappen* Laiyolo, *Regenschappen* Barang-barang, *Regenschappen* Balla Bulu, *Regenschappen* Bonea, *Regenschappen* Batangmata, *Regenschappen* Tanete, dan *Regenschappen* Buki (Arsip Pemda Selayar, No. Reg: 142).

Beberapa *Regenschappen* ini masing-masing dipimpin oleh seorang Regent atau Opu yang terkait langsung dengan *Contoleur* Belanda yang berkedudukan di Benteng (Sapolohe) atau rumah jabatan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian perlu pula diuraikan bahwa *Regenschappen* ini membawahi Gallarang Schappen dan Kampung-kampung yang dipimpin oleh Gallarang atau Punggawa (Arsip Pemda Selayar, No. Reg: 142).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa keterbatasan tenaga administratif pemerintah Hindia Belanda, menyebabkan ia memanfaatkan tenaga pribumi yang memang sebelumnya telah memiliki jabatan (berkuasa). Selain itu, kebijakan kolonial Belanda juga tampak pada upaya penggabungan beberapa *Regenschappen* yang dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi. Meskipun demikian penggabungan tersebut, tampak justru tidak menyelesaikan masalah. Betapa tidak, perluasan

wilayah dan penyerobotan yang dilakukan terus menerus, pada gilirannya membawa efek buruk bagi kelangsungan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Kondisi ini oleh Jhr James Louden dipandang sebagai langkah ke arah kejatuhan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pernyataan ini dikemukakan oleh Louden pada tahun 1861, ketika diketahui bahwa usaha perluasan kekuasaan dilaksanakan terus-menerus walaupun penguasaan dan pengawasan daerah-daerah yang dikuasai sendiri belum dikuasai dan diawasi sepenuhnya (Poelinggomang, 2004: 43).

Hasil penggabungan tersebut antara lain: (1) Gelarang Panggiliang dan Bua-Bua digabung menjadi Gelarangschappen Benteng, (2) Regenschappen Mare-Mare dan Gantarang digabung ke Regenschappen Bonea, (3) Regenschappen Putabangung digabung ke dalam Regenschappen Bontobangung, dan (4) Regenschappen Bonto Barusu digabung ke dalam Regenschappen Laiyolo, namun di Bontobarusu tetap ada Balegau. Setelah terjadi penggabungan, maka Regent yang ada di Selayar antara lain: (1) Regentschappen (Opu Tanete), (2) Regentschappen (Opu Batangmata), (3) Regentschappen (Opu Onto), (4) Regentschappen (Opu Buki), (5) Regentschappen (Opu Bonea), (6)

Regentschappen (Opu Bontobangung), (7)  
Regentschappen (Opu Balla Bulo), (8)  
Regentschappen (Opu Laiyolo), (9) Regentschappen  
(Opu Barang-barang), dan (10) Regentschappen  
(Opu Benteng) (Poelinggomang, 2004: 43-44).

Proses penggabungan beberapa wilayah atau perampangan administratif yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut, memang terkesan merupakan bagian integral dari politik yang dijalankan. Hal ini tercermin melalui ketidakjelasan mengenai alasan dan syarat penggabungan, sehingga kesan yang justru muncul adalah ini hanya merupakan strategi menguasai rakyat melalui tangan dan peran penguasa bernama opu. Kemudian satu kenyataan ironis yang terjadi yakni para opu yang menjalankan pemerintahan, rupanya tidak digaji secara langsung dengan anggaran operasional yang berasal dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Sebaliknya, gaji para opu justru harus dipungut melalui penarikan pajak atau bea dari rakyat atas izin dan perintah dari kolonial Belanda. Sekadar digambarkan bahwa gaji para opu 1918, antara lain: (1) Opu Bontobangung sebesar f 1500, (2) Opu Tanete sebesar f 900, (3) Opu Buki sebesar f 600, (4) Opu Laiyolo sebesar f 960, (5) Opu Benteng sebesar f 720, (6) Opu Bonea

sebesar f 1200, (7) Opu Batangmata sebesar f 1140, (8) Opu balla Bulu sebesar f 600, dan (9) Opu Barang-Barang sebesar f 360 (Poelinggomang, 2004: 32).

Beberapa data mengenai kondisi Selayar terutama terkait dengan bidang pemerintahan pada masa kolonial Belanda, menggambarkan kepada kita bahwa betapa para opu memiliki andil yang cukup penting dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan kaum kolonialis di Tanadoang. Hal ini sekaligus melahirkan pertanyaan ganda yakni apakah para pemimpin di Selayar telah dan pernah menerima dengan baik kehadiran para penjajah serta mereka telah berkhianat kepada rakyat?. Pertanyaan lainnya yakni apakah hal ini harus dimaknai sebagai sebuah keterpaksaan atau ketiadaan pilihan lain, sehingga para opu harus menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan kolonial?. Keraguan ini cukup beralasan dan didukung oleh pondasi argumentatif yang kuat, terutama bila mengacu pada cerita rakyat setempat yang cenderung meragukan loyalitas para opu pada masa kolonial.

Dalam perkembangan selanjutnya, rupanya kembali terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan di Selayar. Hal ini tampak pada

pergantian nama pemeritahan dari *Regenshappen* kemudian berubah menjadi *Adatgemenschap* yakni 1920 hingga 1922. Meskipun demikian, dua wilayah adminitratif yakni Bonea dan Bontobangung dalam perubahan nama ini justru tetap menggunakan istilah lama yakni Regenshappen (Poelinggomang, 2004: 46).

Dua tahun kemudian yakni 1924, struktur pemerintahan Selayar kembali mengalami perubahan. Berdasarkan *Besluit van Selaijer* 8 Agustus 1924 Wes 32. en 33/Staatblad Nes 365-369, maka *Onderafdeling* Selayar dibagi atas beberapa distrik: Distrik Tanete, Onto, Buki, Bonea, Bontobangun, Balla Bulu, Laiyolo, Barang-barang, Benteng, dan Matangmata. Sementara itu, terdapat pula Onderdistrik, antara lain: Onderdistrik Tambolongan, Kajuadi, Bonerate, Jampea, Kalo di Lambego, Kalao Toa (Arsip Pemerintah Daerah Selayar, No. Reg: 143).

Khusus kondisi di bidang ekonomi antara tahun 1920 hingga 1926, dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa periode ini dengan beberapa pengecualian seluruh masyarakat berada dalam keadaan yang sangat makmur. Betapa tidak, masyarakat yang bermukim di pantai barat Selayar terlibat dalam aktivitas perdagangan kopra. Hal ini

dimungkinkan karena periode ini permintaan akan kebutuhan komoditi yang akrab dikenal sebagai emas hijau ini senantiasa mengalami peningkatan. Indikator kemakmuran mereka tercermin melalui perhiasan emas seperti kalung dan gelang saat menghadiri pesta. Karena itu, wajar jika Asisten Residen Van Der Miesen pada suatu ketika saat acara peringatan ulang tahun Ratu 1925, sempat menyatakan keheranannya menyaksikan betapa di leher para pengunjung bergelantungan perhiasan emas. Bahkan pemandangan yang cukup menakjubkan sempat dilihatnya, yakni banyak di antara orang Selayar yang menggunakan gigi emas (Arief, ed, 2004: 110).

Hal ini antara lain, kerap dijadikan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat di Selayar. Kemakmuran meskipun tidak merata pada seluruh masyarakat Selayar, dapat digambarkan melalui data perbandingan pendapatan pribumi dengan orang Asing.

Tabel. 3 Perbandingan tingkat pendapatan orang Pribumi dan orang Asing di Selayar (pendapatan di atas f 1,200) Tahun 1923.

No.	Wilayah	Orang Pribumi	Orang Asing (Chinese)
1.	Benteng, Bonea	20	12

2.	Selayar Utara	23	-
3.	Selayar Selatan	27	-
4.	Jampea	63	2
	Total	133	14

Sumber: ANRI/S/6II/r35 s, II-6-1923.

Masa kemakmuran masyarakat karena komoditi kelapa pun, segera berakhir tahun 1927-an seiring dengan berjangkitnya penyakit (hama) pada tanaman kelapa serta anjloknya harga kopra. Pada tahun 1928, justru perputaran mata uang dalam jumlah besar bergeser ke wilayah Flores dan Timor. Bahkan kondisi memperlihatkan terjadi yakni di Selayar bagian Selatan menjadi pusat wabah penyakit tanaman kelapa dan digambarkan sebagai wilayah miskin tahun 1929. Pada masa yang sama di wilayah bagian utara seperti Onto, Buki, dan beberapa bagian di Bonea, masyarakat dihadapkan pada ketiadaan pilihan yakni harus menjual perhiasan dan emas akibat kegagalan panen jagung mereka (Arief, ed, 2004: 112).

Roda waktu pun terus berputar di antara krisis ekonomi yang melanda masyarakat dan dinamika pemerintahan di Selayar pun terus bergulir, melewati tahapan masa hingga akhirnya menjadi bagian dari Afdeling Bonthain (Bantaeng). Bahkan hingga masuknya pemerintah Jepang di Bumi

Tanadoang dan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Selayar tetap berbentuk Onderafdeling.

## DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad, dkk. 1981/1982. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Ahmadin. 2001. *Islam di Bawah Dominasi Kaum Kolonial: Indonesia Masa Penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang*. Makassar: Makalah unpublished.

-----, 2007. *Ketika Jepang Menjamah Bumi Tanadoang*. Makassar: Makalah Unpublished.

Anonim. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848* (Jakarta: Arsip Nasional RI).

Anonim. 1979. *Daftar Nama-nama Kepala Daerah/Pemerintah Negeri Kabupaten Selayar*. 1979. Benteng: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Anonim. 1984. *Selayang Pandang Sejarah Daerah Tingkat II Selayar*. Selayar: Pemda.



- Anonim. "Vonis Daeng Mannojengen" dalam edisi bahasa Indonesia dan Makassar. Makassar: Koleksi Arsip Selayar, 1826-1848.
- Anonim. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda Tk. I.
- Arief, Syaiful, (ed.) 2004. *Jelajah Pemerintahan dan Pembangunan Selayar: Tomanurung Sampai Akib Patta*. Selayar: Pemda.
- Arsip Pemerintah Daerah Selayar, No. Reg: 142.
- Dimiyati, Muhammad. 1950. *Sejarah Perang Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Edward L. Poelinggomang. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Harun Kadir, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, 1984
- Heersink, Christian. 1995. *The Green Gold of Selayar: A Socio-Economic History of an Indonesian Coconut Island*. Amsterdam: Vrije Universiteit.
- Kartodirjo, Sartono. 1975. *Sejarah nasional Indonesi VI*. Jakarta: Gramedia.
- Mujianto. 1988. *Indonesia Abad 20 Jilid I*. Jakarta; Kanisius.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1967. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Sagimun. 1969. *Peran Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*. Jakarta: Bina Aksara.

Soebantarjo. 1960. *Sari Sejarah Asia-Australia*. Yogyakarta: Bopkori.